



LEMBAR DISPOSISI / CATATAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Tanggal Masuk : 15/10/2015

Indek: UPT Kode : lnt 1045

Hal/isi Ringkas : Lap. Rapat Membahas Konsep Pengaduan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Website.

Tgl./Nomor Surat : 13 Okt. 2015/1003/-072
 Asal : Ka.UPT Jakarta Smart City.

Instruksi / Informasi :

*ke UPT JSE
 - Optimalisasi
 Tabakan Fitur melalui
 - Info perku website ke forum
 P. Nugraha
 → Koordinasi Kebijakan
 → TL ASMO Kores*

Diteruskan / kepada :

1. Sekretaris
2. Kabid Media Massa
3. Kabid Informasi Publik
4. Kabid SIM
5. Kabid Infrastruktur Perangkat Lunak
6. Kabid Infrastruktur Perangkat Keras
7. Kabid POSTEL

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

Kepada :

* Coret yang tidak perlu

B. Wisa
 P. R. Roy
 P. R. Roy
 P. R. Roy
 29/10



KARTU KENDALI

No. Urut :	Kode :	Tgl (K) / M :
Indek		Dari / Kepada *)

Perihal / Isi ringkas

*Supaya ...
...
...*

Tgl. Srt. :	No. Srt. :	Lampiran :
Pengolah	Diteruskan	Disimpan

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Lembar kesatu



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt. 13 dan 3 serta Blok F Lt. Dasar

Telp. 3823355 Fax. (021) 3848850 dan Fax. (021) 3823253

JAKARTA 10110

LAPORAN RAPAT

Nomor : 10031-072

Kepada Yth. : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
Dari : Kepala UPT Jakarta Smart City
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Membahas Konsep Pengaduan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Melalui Website

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat membahas konsep pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui website, dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Biro Kesejahteraan Sosial Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Dipimpin oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial. Serta dihadiri oleh Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana, Unsur Dinas Sosial, Unsur Dinas Pendidikan, Unsur Polda Metro Jaya, Unsur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta, Tim PKK Provinsi DKI Jakarta, Unsur Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) DKI Jakarta, dan Unsur Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan.
2. Pembahasan :
 - a. Biro Kesejahteraan Sosial akan menyediakan layanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan. Adapun prosedur kerja unit pelayanan terpadu bagi anak dan perempuan korban kekerasan yang tercantum didalam SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi lima jenis pelayanan, yaitu:
 - Penanganan Pengaduan
 - Pelayanan Kesehatan
 - Rehabilitasi sosial
 - Penegakan dan Bantuan Hukum
 - Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
 - b. Oleh karena itu Biro Kesejahteraan Sosial akan membentuk unit pelayanan terpadu (UPT), unit tersebut bertugas menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 - c. Adapun tatacara pelaporan yang dapat disampaikan oleh Biro Kesejahteraan Sosial yaitu:
 - Pelapor dapat melaporkan kejadian tersebut secara langsung dengan cara mendatangi Biro Kesejahteraan Sosial
 - Penanganan pengaduan Melalui Telepon
 - Penerimaan pengaduan melalui surat
 - Penanganan pengaduan dari rujukan
 - Penjangkauan korban (outreach)

0721

- d. Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai target pembentukan pelayanan terpadu berbasis website, oleh karena itu Jakarta Smart City untuk membantu Biro Kesejahteraan Sosial terkait dengan proses pembuatan website pelayanan terpadu. Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan akan menyediakan sub domain. Sesuai dengan target Biro Kesejahteraan Sosial bahwa website yang akan selesai pada akhir bulan November 2015.
- e. Keluhan dari masyarakat korban kekerasan perempuan dan anak dapat disampaikan melalui website, karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Biro Kesejahteraan Sosial bahwa Jakarta memiliki jumlah tertinggi terhadap kekerasan perempuan dan anak.
- f. Selain itu Biro Kesejahteraan Sosial perlu melakukan koordinasi dengan Biro Hukum terkait pembuatan payung hukum perlindungan kekerasan perempuan dan anak di DKI Jakarta.
- g. Adanya Rapat lanjutan akan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial dengan UPT. Jakarta Smart City terkait dengan pembahasan tindaklanjut pembuatan website perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Saran/tindaklanjut:

UPT Jakarta Smart City untuk segera berkoordinasi dengan Biro Kesejahteraan Sosial terkait dengan pembangunan website pelayanan terpadu bagi anak dan perempuan korban kekerasan dan integrasi dengan Jakarta Smart City.

Demikian laporan ini disampaikan. Mohon arahan lebih lanjut dari Bapak.

13 Oktober 2015

Kepala UPT Jakarta Smart City
Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
Provinsi DKI Jakarta,



Setiaji

NIP197406081998031003

Tembusan :
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta